

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti halnya organisasi sektor privat (perusahaan), Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik setiap akhir tahun juga menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LRA memberikan informasi tentang anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. LAK memberikan informasi tentang saldo awal kas, mutasi masuk dan keluar serta saldo kas pada akhir periode. Sedangkan CaLK memberikan informasi atau penjelasan secara kualitatif tentang pos-pos yang ada di LRA, Neraca dan LAK.

Laporan Arus Kas sebagai salah satu komponen dari LKPD sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah. Bagaimana pengaruh masing-masing kategori aktivitas pemerintah daerah yaitu operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Pembaca laporan keuangan melalui informasi dalam Laporan Arus Kas dapat menilai kinerja finansial pemerintah daerah selama periode tersebut dan dapat menggunakannya untuk memprediksi kondisi keuangan dimasa mendatang. Laporan Arus Kas tersebut merupakan

penghubung mata rantai dari rekening riil yang dicerminkan dalam Neraca dengan rekening nominal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagi pengguna eksternal, Laporan Arus Kas ini memberikan informasi yang lebih bermakna jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca karena Laporan Arus Kas menunjukkan kondisi objektif kas dan perubahan-perubahannya selama satu periode. Laporan Arus Kas menginformasikan mengenai perjalanan kas selama satu periode yaitu dari saldo awal kas hingga saldo akhirnya. Dalam Laporan Arus kas tersebut digambarkan perubahan kas terkait dengan asal mulanya (sumber) penambahan kas dan penggunaannya. Sementara neraca hanyalah merupakan potret posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal laporan saja, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran lebih sekedar menunjukkan tingkat kepatuhan anggaran, tetapi tidak secara spesifik menginformasikan aktivitas pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk melengkapi informasi Neraca dan Laporan Arus Kas agar lebih membantu bagi pengguna laporan dalam memahami dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah serta pembuatan keputusan maka diperlukan Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas di sektor bisnis jika dibandingkan dengan sektor publik terdapat beberapa perbedaan baik format ataupun tujuannya. Di sektor bisnis, Laporan Arus Kas menggambarkan kinerja organisasi dan menghasilkan kas. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa organisasi bisnis dibentuk untuk menghasilkan laba (*profit motive*) sehingga organisasi merupakan mesin penghasil uang (*cash maker*) yang dicerminkan dari

kemampuannya menghasilkan laba. Semakin tinggi kemampuan organisasi menghasilkan laba, maka organisasi itu dinilai bagus kinerjanya. Untuk itulah kemudian diperlukan informasi keuangan yang memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam menghasilkan laba yaitu Laporan Laba Rugi. Namun laba dalam Laporan Laba Rugi tidak menunjukkan bahwa jumlah laba dalam laporan tersebut berupa kas semua, sebab Laporan Laba Rugi disusun dengan pendekatan akuntansi akrual yang mencatat pendapatan non kas dari penjualan kredit dan biaya non kas, seperti biaya yang belum dibayarkan, biaya depresiasi dan sebagainya. Laporan Arus Kas dibutuhkan untuk menunjukkan secara spesifik kondisi obyektif kas dan kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas serta menggunakan kas tersebut.

Berbeda dengan sektor bisnis, sektor publik tidak bertujuan mengejar laba tetapi memberikan pelayanan publik (*public service*). Pelayanan publik yang harus disediakan bersifat masal dan harus memenuhi prinsip keadilan dan pemerataan. Organisasi sektor publik, termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah, dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang disediakan. Kinerja Pemerintah Daerah tidak diukur dari kemampuannya menghasilkan laba tetapi dari kualitas pelayanan publik yang disediakan. Namun untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tentunya diperlukan dana untuk membiayainya. Sumber dan penggunaan dana publik tersebut digambarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas yang berarti juga menunjukkan jumlah kas riil, tetapi laporan tersebut belum menunjukkan secara spesifik pengaruh aktivitas Pemerintah Daerah dalam

mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan Laporan Arus Kas sebagai bahan informasi pendukung (suplemen) atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah lainnya, setiap akhir tahun menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari komponen laporan keuangan tersebut selama ini Pemerintah Daerah dalam analisa dan pembahasan laporan keuangan lebih fokus kepada Laporan Realisasi Anggaran, sementara komponen laporan keuangan yang lain termasuk laporan arus kas cenderung dianggap sebagai laporan keuangan yang kurang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Sehingga kinerja pemerintah daerah selama ini selalu diukur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran saja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti laporan arus kas organisasi sektor publik, dalam hal ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan judul ” ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kasus Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 – 2013) ”.

1.2 Batasan Masalah

Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meliputi laporan realisasi keuangan, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Dari keempat jenis LKPD tersebut diatas ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas pada pembahasan Laporan Arus Kas dengan lingkup pembahasan sebagai berikut :

- a. Analisa pertumbuhan arus kas Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2009 dan 2013 jika dilihat dari pertumbuhan aktivitas operasi, pertumbuhan aktivitas investasi aset non keuangan, pertumbuhan aktivitas pembiayaan dan pertumbuhan aktivitas non anggaran
- b. Analisa arus kas Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2009 dan 2013 dilihat dari arus kas bebas.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimanakah pertumbuhan arus kas Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2009 dan 2013 jika dilihat dari pertumbuhan aktivitas operasi, pertumbuhan aktivitas investasi aset non keuangan, pertumbuhan aktivitas pembiayaan dan pertumbuhan aktivitas non anggaran
- b. Bagaimanakah arus kas Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2009 dan 2013 dilihat dari arus kas bebas.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menganalisis bagaimanakah pertumbuhan arus kas Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2009 dan 2013 jika dilihat dari pertumbuhan aktivitas operasi, pertumbuhan aktivitas investasi aset non

keuangan, pertumbuhan aktivitas pembiayaan dan pertumbuhan aktivitas non anggaran

- b. Untuk menganalisis bagaimanakah arus kas Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2009 dan 2013 dilihat dari arus kas bebas.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan sarana untuk mengimplementasikan teori tentang akuntansi sektor publik khususnya keuangan daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya yang berkaitan pentingnya informasi dari hasil analisa Laporan Arus Kas untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi sektor publik dan menjadi bahan atau sumber informasi bagi peneliti berikutnya.